



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

TPP Seluma Salahi Permendagri

BENGKULU, BE - Koordina-
nasi tim penyidik Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Bengkulu, ke
Biro Hukum Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri)
terkait aturan pemberian dana
tambahan penghasilan pegawai
(TPP) Kabupaten Seluma,
2017, sudah ada hasilnya. Ahli
dari Biro Hukum Kemendagri,
serta ahli tentang peraturan
pemerintahan (PP) menegaskan,
pemberian TPP yang kini
dilikid Kejati tersebut menyala-
hali aturan.

Hal tersebut dikatakan Ka-
jati Bengkulu, Baginda Polin

Lumban Gaol SH MH melalui
Asisten Tindak Pidana Khusus
(Aspidsus) Kejati Bengkulu
Henri Nainggolan SH MH.

"Ahli biro hukum dan ahli
tentang peraturan pemer-
intahan menyebutkan pem-
berian TPP tersebut tidak
memenuhi apa yang sudah
diinstruksikan Mendagri.
Artinya pemberian TPP
tersebut menyalahi aturan
dari Mendagri dan peraturan
pemerintah," jelas Aspidsus.

Masih dikatakan Aspidsus,
dengan adanya kejelasan TPP
itu menyalahi aturanmaka Ke-

jati pun meneruskan proses
hukum perkara yang diduga
merugikan negara Rp 12 mili-
ar tersebut. Bahkan Aspidsus
menargetkan, jika hasil kon-
sultasi dan pemeriksaan tahap
penyelidikan sudah dijabarkan
oleh tim, secepatnya kasus ini
segera ditingkatkan ke penyidi-
kan.

"Kita harus pelan-pelan
dalam menangani suatu kasus
korupsi. Kemungkinan dua
minggu lagi kita mengeluarkan
penetapan apakah perkara ini
lanjut atau tidak," imbuh As-
pidsus.

Sekedar mengingatkan, se-
jumlah pejabat di Pemkab Se-
luma, yang terkait atau men-
getahui tentang pemberitan
TPP tersebut sudah dimintai
keterangan pada tahap penyeli-
dikan. Sebut saja Asisten
I Pemkab Seluma Mirin Ajib
serta salah seorang Kabid di
BPKAD Seluma.

Dugaan korupsi TPP di Ka-
bupaten Seluma, diselidiki
Kejati Bengkulu, berdasarkan
laporan dari masyarakat. Di-
dalam laporan tersebut ang-
garan TPP di Kabupaten Se-
luma, selama setahun Rp 50

miliar. Ada dugaan besaran
TPP yang ditetapkan tidak
sesuai dengan beban kerja
apratur sipil negara (ASN)
di Pemkab Seluma. Pejabat
sekelas Kabid dan Kabag
menerima Rp 16 sampai Rp
12 juta setiap bulannya. Jum-
lah tersebut tersebut lebih ke-
cil dari pada organisasi per-
angkat daerah (OPD) tipe A
seperti Kadis yang menerima
Rp 13 juta. Diduga tidak ada
dasar pembagian TPP serta
tidak ada analisa beban kerja
dalam pembayaran TPP terse-
but. (167)